

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Timur dan Barat

Kahar¹, Mustari Mustafa², Sakaruddin Mandjarreki³

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Indonesia

*Correspondence email: kaharkosongtiga97@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami pemikiran “Murtadha Muthahhari dan Paulo Freire, dalam pemberdayaan masyarakat Islam, dalam konteks ke-Indonesiaan dan asas Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul “Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Timur dan Barat” adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini mencakup kegiatan pengumpulan data melalui literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen tertulis lainnya, untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Timur dan Barat. Hasil dari penelitian mengenai “Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Timur dan Barat” menunjukkan bahwa kedua perspektif memiliki perbedaan mendasar namun juga kesamaan dalam tujuan akhir pemberdayaan masyarakat. Perspektif Timur, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan spiritual, serta pemikiran menekankan pendekatan yang harmonis, mengedepankan kearifan lokal dan kolektivitas sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan di sini dipandang sebagai upaya untuk membantu individu mengembangkan potensi diri dalam kerangka nilai-nilai sosial yang kuat. Sebaliknya, perspektif Barat, khususnya pemikiran Paulo Freire, berfokus pada pendidikan kritis dan transformasi sosial. Paulo Freire mengusulkan pemberdayaan melalui pendidikan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah mereka, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengubah struktur sosial yang menindas.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Timur dan Barat

Abstract: This research aims to find out and explore the thoughts of Murtadha Muthahhari and Paulo Freire in Islamic community empowerment in the context of Indonesia and the principles of Pancasila. The research method used in the study entitled “Principles of Community Empowerment in Eastern and Western Perspectives” is the library research method. This method includes data collection activities through relevant literature, such as books, journals, research reports, and other written documents, to understand and analyze the principles of community empowerment in Eastern and Western perspectives. The results of the research on “Principles of Community Empowerment in Eastern and Western Perspectives” show that both perspectives have fundamental differences but also similarities in the ultimate goal of community empowerment. The Eastern perspective, which is influenced by cultural and spiritual values, and thinking emphasizes a harmonious approach, prioritizing local wisdom and social collectivity in building community welfare. Empowerment here is seen as an effort to help individuals develop their potential within the framework of strong social values. In contrast, the Western perspective, particularly the thinking of Paulo Freire, focuses on critical education and social transformation. Paulo Freire proposes empowerment through education that encourages people to actively participate in identifying and addressing their problems.

Keywords: Empowerment, Community, East and West

PENDAHULUAN

Menurut *Mardikanto* dan *Soebiato*, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat masyarakat yang saat ini belum mampu keluar dari jeratan kemiskinan dan ketertinggalan. Dalam istilah lain, pemberdayaan adalah proses memampukan serta memandirikan masyarakat. *Aziz* menambahkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam memperbaiki kualitas hidup. Pada dasarnya, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mengoptimalkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua warga melalui berbagai kegiatan swadaya.

Sulistiyani juga menyatakan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan komunitas yang mandiri. Kemandirian ini mencakup kemandirian dalam berpikir, bertindak, serta mengendalikan apa yang mereka lakukan. Untuk mencapai kemandirian tersebut, diperlukan proses belajar yang bertahap, sehingga masyarakat akan memperoleh kekuatan atau kemampuan secara perlahan seiring berjalannya waktu.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri, yang difasilitasi oleh pelaku pemberdayaan. Kelompok yang menjadi fokus utama dari pemberdayaan ini adalah mereka yang berada dalam kondisi lemah dan tidak memiliki kekuatan, sumber daya, atau kemampuan untuk mengakses peluang produktif, termasuk mereka yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang mereka miliki.

Secara sosial, masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung masih digolongkan sebagai kelompok yang marginal atau terpinggirkan. Mereka tidak memiliki kekuatan, kemampuan, atau modal yang cukup untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau pengusaha yang memiliki akses sosial dan politik yang lebih baik. Ketidakmampuan ini, baik secara sosial maupun ekonomi, menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat tersebut untuk mencapai kesetaraan dengan kelompok masyarakat lain yang lebih mapan. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dipahami secara mendalam dan harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan program. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan harus memperhatikan situasi ini agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. memperhatikan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan lindung.

Dalam pengertian pemberdayaan merupakan proses untuk memperdayakan sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut *Sumardjo*, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya. Sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan menurut Widjaja menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan merupakan upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa dan sekitarnya.

Dengan memahami konsep pemberdayaan masyarakat, kita akan lebih mudah untuk memperdayakan masyarakat sebagaimana mestinya. Misalnya, pemberdayaan masyarakat melalui dengan metodologi belajar sambil bekerja dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, melakukan pemberdayaan tidak hanya sekedar menyamapaikan informasi semata-mata atau konsep-konsep teoretis. Akan tetapi, kita sebagai penyuluh harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata di lapangan.

Setelah kita memahami konsep pemberdayaan masyarakat, kita melakukan langkah selanjutnya misalnya bagaimana tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya tahapan dalam pemberdayaan masyarakat ia akan tersusun secara sistematis dalam pemberdayaan tersebut dan ketika pemberdayaan sistematis akan menjadi lebih kuat secara metodologi. Mengapa demikian? Karena, dengan tahapan-tahapan yang dilakukan kita akan memperdayakan masyarakat secara bertahap dan sistematis. Misalnya kita, mengambil tahapan melalui bina manusia (bina diri dan keluarga, serta sosial), bina usaha, dan bina lingkungan (masyarakat atau sosial). Apakah setelah memahami konsep dan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat berhenti sampai disitu? Tidak. Akan tetapi, apa yang kita pahami tentang konsep dan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat perlu diaktualisasikan di realitas atau sosial. Artinya, dalam pemberdayaan tidak hanya mentok dikonsep, namun perlu diketahui bahwa apa yang dikonsep itu yang kemudian kita akan aktualisasikan dalam masyarakat. Setelah kita aktualisasikan apa yang kita pahami tentang pemberdayaan dan tahapan-tahapannya, dari situlah masyarakat akan mengalami kesejahteraan, dengan kesejahteraan masyarakat, manusia mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupannya.

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Aswas, dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat atau agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan.

- b. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran.
- c. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.
- d. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan dalam masyarakat.
- e. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.
- f. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun.
- g. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi.
- h. Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan.
- i. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain.
- j. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun nonfisik (saran, waktu, dukungan).
- k. Aparat atau agen pemberdayaan bertindak sebagai Fasilitator yang harus memiliki kemampuan atau kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat. Mau bekerjasama dengan semua pihak atau institusi maupun lembaga masyarakat atau LSM yang terkait.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan antara individu dan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya berbasis kepada daya individu dan daya masyarakat sehingga mencapai sebagai kejahteraan sosial. Melalui upaya optimasi daya individu dan daya sosial akan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari pemberdayaan individu sebagai sebuah landasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena tidak mungkin melakukan pemberdayaan masyarakat, tanpa dilandasi dengan pemberdayaan individu. Dalam artian, bahwa untuk melakukan perubahan sosial, berangkat dari perubahan individu.

2. Tahapan-Tahapan Dalam Pemberdayaan

Wilson, mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam organisasi menjadi beberapa tahapan yakni sebagai berikut: Pertama, menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk melakukan perubahan dan perbaikan, segala upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak akan menarik perhatian, simpati, maupun partisipasi dari masyarakat. Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kenyamanan atau hambatan-hambatan yang ada, sehingga masyarakat berani

mengambil keputusan untuk ikut serta dalam proses pemberdayaan demi tercapainya perubahan dan perbaikan yang diinginkan.

Ketiga, mengembangkan kesediaan untuk berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau meningkatkan kondisi kehidupan. Keempat, meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang sudah dirasakan memberikan manfaat nyata atau perbaikan. Kelima, meningkatkan peran aktif dan komitmen dalam kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan melalui munculnya motivasi untuk terus melakukan pemberdayaan. Keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Di sisi lain, Lippit dalam tulisannya mengenai perubahan atau pemberdayaan yang terencana menguraikan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Pertama, penyadaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang eksistensi mereka, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas, serta kondisi lingkungan mereka yang mencakup aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Penyadaran seperti ini, menurut Paulo Freire, merupakan inti dari setiap kegiatan pendidikan kritis.

Kedua, menunjukkan adanya masalah, yakni mengidentifikasi kondisi yang tidak diinginkan terkait dengan sumber daya alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, serta aksesibilitas lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik. Proses ini juga melibatkan penunjukan faktor-faktor penyebab masalah, baik yang berasal dari kelemahan internal maupun ancaman eksternal.

Ketiga, membantu dalam pemecahan masalah, mulai dari analisis akar masalah, analisis alternatif solusi, hingga memilih solusi terbaik yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang ada.

Keempat, menekankan pentingnya perubahan yang sedang dan akan terjadi di lingkungan, baik di organisasi maupun masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global). Mengingat perubahan lingkungan internal dan eksternal semakin cepat, masyarakat perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut melalui perencanaan yang matang.

Kelima, melakukan pengujian dan demonstrasi sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan karena tidak semua inovasi selalu cocok secara teknis, ekonomis, sosial-budaya dan politik dengan kondisi masyarakatnya. Keenam, memproduksi dan publikasi informasi baik berasal dari luar (penelitian, kebijakan, dan produsen) maupun dengan kearifan tradisional. Tentunya dengan sesuai perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik calon penerima penyuluhannya. Ketujuh, melaksanakan pemberdayaan, akan memberikan kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihannya.

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Timur

Pemberdayaan dalam perspektif Timur merupakan menguatnya potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri manusia sebagai suatu makhluk yang berkesadaran. Dari sinilah, manusia akan lebih jelas bahwa melalui pendidikan yang

sesuai dengan fitrahnya sebagai sesuatu yang hendak dididik dan harus diarahkan untuk membangkitkan serta mengaktifkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia dan akhirnya mampu memperdayakan dirinya dan sosial.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki tingkatan kesadaran, dari tingkatan kesadaran tersebut atas dasar pendidikan akan mengaktifkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia hingga sampai pada aktualisasinya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang di hadapi dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Dengan ini, atas proses dan melatih terus menerus kemampuan masyarakat perlahan akan memperdayakan dirinya hingga pada pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu yang diperlukan adalah memahami setiap tradisi dan adat, melakukan pemberdayaan terhadap nilai-nilai yang sudah adil dan melakukan transformasi budaya di dalamnya. Transformasi di sini adalah suatu proses terciptanya hubungan yang secara mendasar baru dan lebih baik. Strategi dalam budaya pemberdayaan masyarakat pada kita memungkinkan kita lebih memilih pluralisme dan memberikan ruang untuk setiap masyarakat adat menciptakan sejarah mereka sendiri. Dalam strategi pemberdayaan masyarakat sangat bertentangan dengan strategi modernisasi yang ingin memodernisasikan masyarakat tradisi.

Karena hanya melalui strategi transformasilah kita bisa menjamin terjadinya proses pemberdayaan baik antara relasi di dalam masyarakat adat sendiri maupun hubungan antara masyarakat adat dan di luar adat. Transformasi terhadap masyarakat adat juga harus memiliki dimensi pemberdayaan melalui dengan memberikan ruang agar masyarakat adat dapat mengembangkan kekayaan budaya dan menghormati hak mereka untuk mengembangkan kemampuan bersama atau secara kolektif. Adapun khusus apresiasi terhadap budaya harus dilakukan dengan menjamin hak hidup dan menghargai kemanusiaan dalam menentukan jati dirinya. Secara lebih rinci pengakuan terhadap pemberdayaan masyarakat adat menyangkut pengakuan hak-hak kolektif atas tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam tanah bertentangan dengan kepetingan industrialisasi yang berwajah kapitalisme.

Setiap pemberdayaan masyarakat dimulai dengan mengarahkan perhatian kita pada pemberdayaan individual dengan mengubah sikap individu. Mustahil memperdayakan sebuah masyarakat tanpa pemberdayaan individu terlebih dahulu, jadi individu sebagai landasan utama untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Barat

Pemberdayaan dalam perspektif Paulo Freire adalah guru (sebagai pembicara) dan murid (sebagai pendengar) secara bersama-sama merefleksikan diri mereka sendiri tentang dunia tanpa melakukan dikotomi (pemisahan) antara guru dan murid. Di lain sisi, perlu diketahui bahwa antara refleksi (teoretis) dan praktis (perbuatan) tidak terjadi pemisahan agar kemudian mampu memperdayakan masyarakat. Manusia memperdayakan kemampuan masyarakat dengan membentuk paradigma berpikirnya secara kritis dan mereka hadir secara mandiri di dunia yang dengannya mampu menemukan dirinya yang mandiri. Mereka hadir untuk melihat masyarakat (dunia) tidak hanya sebagai masyarakat yang statis (diam). Namun, sebagai realitas yang akan

mengalami sebuah proses perubahan.

Berbagai pernyataan mengenai pemberdayaan sama-sama eliptis, meskipun pernyataan-pernyataan itu memerlukan paling tidak empat variable.

- a. Subjek pemberdayaan.
- b. Struktur kekuasaan yang berhubungan atau bertentangan dengan orang atau kelompok yang diperdayakan.
- c. Proses-proses yang membuat pemberdayaan itu terjadi.
- d. Hasil atau hasil pemberdayaan.

Klaim-klaim mengenai pemberdayaan harus menspesifikan nilai-nilai untuk A-D dalam skema berikut: poin 1 (subjek) diberdayakan dalam kaitannya dengan poin 2 (beberapa aspek penstruktur kekuasaan diskursif) melalui poin 3 (proses atau kualitas) seperti yang diakibatkan pada poin 4 (nilai hasil dan akhir).

Manfaat-manfaat yang sangat nyata mengalir dengan menanggapi tuntutan konseptual akan pemberdayaan secara serius. Di sini jauh lebih banyak bahaya ketimbang semata-mata menonjolkan semantik. Semakin dekat dan jelas kita menentukan subjek-sebagai pengajar tertentu maka semakin mungkin kita mengidentifikasi bentuk-bentuk dan proses-proses kekuasaan yang membatasi pilihan-pilihan dalam setting sehari-hari dan mempertimbangkan proses pembelajaran sejalan dengan tujuan yang kita kejar. Demikian pula, semakin bagus teori kita mengenai kekuasaan dihasilkan dan didistribusikan, semakin paham kita akan keberagaman kondisi dan aspirasi peserta belajar serta semakin baik pula informasi yang akan menjadi sarana dan proses yang digunakan untuk meraih hasil belajar.

Jika menerapkan gagasan "Karl Marxisme, rakyat harus memperoleh penjelasan tentang tindakan-tindakan mereka sendiri. Ini penting, bukan demi kelangsungan revolusi proletariat. Namun, juga supaya rakyat secara sadar terus mengaktifkan pengembangan lanjutan pengalaman-pengalaman mereka.

Sederhananya, dengan melalui pengalaman yang dilakukan oleh si subjek akan mengalami pengembangan dan perlahan akan sampai pada titik kesadaran kolektif (sosialisme), atas dasar kesadaran individuatas.

Kasus empiris dikerangkakan oleh sejumlah klaim yang memusat pada pemberdayaan dan dianggap bisa terbukti dengan sendirinya secara jelas.

- a. Pemberantasan buta huruf bisa memberikan kontribusi bagi pemberdayaan individual dan kelompok atau sebaliknya bisa menjadikan alat dominasi dan menghancurkan kepentingan mereka.
- b. Transformasi sosial dan pembangunan nasional yang dihadapi revolusi Nikaragua, tidak bisa disungkan kepada rakyat. Ia harus diperjuangkan ia harus diciptakan dengan dan melalui aktivitas kelompok yang sampai sekarang ini dipinggirkan. Ia harus bisa menjawab kebutuhan mereka dan tumbuh bersama evolusi kesadaran dan kemampuan mereka untuk melakukan tindakan sosial yang konstruktif dan tepat. Di dalam proses partisipasi ini, praktik pemberantasan buta huruf yang benar-benar memperdayakan, sebagai sumber dan hasil perubahan sosial, memiliki peran yang sangat penting.
- c. Banyak keberhasilan inisiatif emansipatoris sejati yang melibatkan upaya pemberantasan buta huruf sangat tergantung pada faktor-faktor yang berasal di luar program-program khusus seperti membaca dan menulis. Oleh karena itu, harus diciptakan perubahan yang lebih luas dan benar-benar menciptakan rasa percaya diri rakyat dan menawarkan basis untuk mempraktikkan dan memperbaiki

- program pemberantasan buta huruf. Sehingga tercipta kondisi yang membuat kemampuan membaca benar-benar bisa memperdayakan mereka dan menjadi bagian integral kehidupan yang lebih luas.
- d. Setelah 1979 pemerintahan revolusioner Nikaragua melakukan sejumlah reformasi besar misalnya, revolusi agrarian, kampanye kesehatan, undang-undang perburuhan baru dan pelopori penciptaan struktur dan proses. Misalnya, organisasi massa, saluran dialog antar masyarakat dan pemimpin. Membantu mengilhami upaya pemberantasan buta huruf dengan efek pemberdayaan yang nyata dan memberikan landasan bagi massa untuk meyakini bahwa kehidupan mereka bisa ditingkatkan melalui keterlibatan mereka sendiri.
 - e. Selama tahun-tahun revolusi Nikaragua, kasus demi kasus mengungkapkan komitmen dan kecerdikan di pihak para pemimpin revolusioner dan mereka yang memelopori organisasi massa untuk menciptakan kondisi membuat program pemberantasan buta huruf. Sekalipun bersifat elementer secara teknis tidak sempurna. Bisa menjadi saran pemberdayaan yang sesungguhnya bagi individu dan masyarakat dilingkup kunci kehidupan sehari-hari mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori riset kepustakaan (library research). Riset kepustakaan, atau yang sering disebut studi pustaka, merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena sumber data dan hasil dari penelitian kepustakaan (library research) disajikan dalam bentuk deskripsi verbal. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis konten, analisis induktif, dan deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Timur

Secara esensial, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup tiga aspek utama, yaitu pengembangan, penguatan potensi, dan kemandirian. Dalam konteks pengembangan, masyarakat yang belum berdaya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan budaya dan kondisi kehidupan. Misalnya, pada masyarakat yang hidup di lingkungan pertanian, pengembangan yang dilakukan harus berfokus pada sektor pertanian, begitu pula dengan budaya masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, pemberdayaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat agar lebih efektif dan tepat sasaran. Penguatan potensi juga merupakan aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui penguatan ini, masyarakat yang belum berdaya diberi motivasi dan pengetahuan tentang keterampilan hidup yang penting, sehingga mereka memiliki sikap optimis. Sikap optimis ini sangat penting dalam proses pemberdayaan. Selain itu, masyarakat juga harus disadarkan akan pentingnya rasa percaya diri dan kerja keras. Jika potensi ini dapat dioptimalkan, maka masyarakat yang awalnya kurang berdaya dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang berdaya.

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aspek kemandirian.

Pemerintah harus memastikan bahwa pemberdayaan yang dilakukan bukan hanya untuk mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga bersifat jangka panjang. Setelah masyarakat diberdayakan, mereka tidak hanya berubah menjadi berdaya, tetapi juga harus dipastikan memiliki kemampuan untuk mandiri dan mengembangkan potensi yang telah mereka miliki. Kemandirian masyarakat tercermin dari kemampuan mereka untuk berpikir, memutuskan, dan bertindak secara tepat dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul, menggunakan potensi yang mereka miliki.

Konsep pemberdayaan masyarakat juga sejalan dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan, Islam juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama manusia. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Pemberdayaan adalah sebuah gerakan tanpa henti yang menjadi bagian dari proses perubahan. Melalui pemberdayaan, perubahan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dapat diwujudkan.

Prinsip perubahan atau pemberdayaan dalam Islam terlukis dalam Q.S Ar-Rad 13:11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Sayyid Qutb menegaskan bahwa ayat ini berbicara tentang perubahan mesti dilakukan manusia. Baginya, Allah tidak akan mengubah nikmat, bencana, kemuliaan, kerendahan, kedudukan maupun kehinaan, kecuali jika mereka mau mengubah perasaan, perbuatan dan kenyataan hidup mereka. Dengan demikian, Allah tidak akan merubah kondisi manusia menjadi lebih baik, jika mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan perubahan.

Untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik, diperlukan dorongan dari orang lain. Hal ini wajar karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ini, konsep pemberdayaan sangat dibutuhkan. Pemberdayaan bertumpu pada bagaimana pihak yang memiliki kekuatan, seperti pemerintah dan individu berpengaruh, memberikan motivasi kepada mereka yang belum berdaya, agar dapat melakukan perubahan dalam aspek kehidupan menuju yang lebih baik.

Perubahan dapat dicapai oleh siapa saja yang memiliki keinginan kuat dan mental yang siap untuk berubah. Keinginan dan mental tersebut menjadi landasan yang mendorong perubahan positif, baik dalam sikap, perilaku, maupun kondisi sosial. Menurut Quraish Shihab, setiap perubahan sangat erat kaitannya dengan sikap mental seseorang. Oleh karena itu, kesiapan mental dianggap sebagai faktor penting yang mempermudah seseorang untuk melakukan perubahan.

Quraish Shihab menafsirkan ayat pertama dalam QS. Ar-Ra'd 13:11 yang menggunakan kata "ma" (apa), merujuk pada segala bentuk perubahan, baik dari kondisi positif menjadi negatif (seperti hilangnya nikmat) atau dari kondisi negatif menuju positif. Sedangkan, ayat kedua berbicara secara khusus tentang perubahan

nikmat. Quraish Shihab menyoroiti beberapa hal terkait kedua ayat ini: pertama, kedua ayat tersebut membahas tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu, yang dapat dipahami dari kata "qaum" (masyarakat). Ini berarti perubahan dimulai dari individu yang menyebarkan ide-idenya, hingga akhirnya diterima oleh masyarakat. Namun, perubahan sosial tetap memerlukan peran dari beberapa orang atau kelompok.

Kedua, penggunaan kata "qaum" juga menunjukkan bahwa hukum-hukum sosial tersebut berlaku universal, tanpa memandang agama, suku, atau ras tertentu, dan berlaku di mana pun dan kapan pun. Karena berbicara tentang "qaum," ayat ini berfokus pada urusan duniawi, bukan ukhrawi. Ketiga, kedua ayat ini juga menjelaskan adanya dua pelaku perubahan: pelaku pertama adalah Allah SWT, yang mengubah nikmat yang telah diberikan kepada suatu masyarakat berdasarkan perilaku mereka, dan pelaku kedua adalah manusia itu sendiri, yang melakukan perubahan dalam diri mereka (aspek internal).

Perubahan internal ini menjadi kunci bagi seseorang untuk menjadi berdaya. Tanpa adanya keinginan dari dalam diri untuk berubah, betapapun besar pemberdayaan yang diberikan oleh pihak luar, perubahan sosial yang lebih baik akan sulit dicapai. Oleh karena itu, perubahan dalam diri manusia merupakan aspek penting dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa adanya keinginan dan kesiapan dari individu untuk berubah hingga mampu melakukan perubahan pada masyarakat.

Melakukan perubahan dalam masyarakat bukanlah hal mudah dan satu metodologi saja. Namun, dalam perubahan masyarakat kita membutuhkan berbagai ragam metodologi dan pada kesempatan ini peneliti menawarkan melalui pendidikan. Walaupun cakupan makna pendidikan yang dinamis memang perlu dibangun, sebab pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia terutama untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera itulah disebut sebagai salah satu pemberdayaan Masyarakat atas dasar pemberdayaan individu. Karena dengan pendidikan itulah manusia dapat maju dan berkembang dengan baik, hingga melahirkan kebudayaan dan peradaban humanisasi (kemanusiaan). Melalui medium pendidikan, diharapkan manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kesejahteraan hidupnya dan lingkungannya. Pada konteks inilah muncul suatu postulasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kebudayaan dan peradaban dalam dirinya sebagai implikasi dari pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, pendidikan perlu diarahkan dengan benar agar mampu menuntun ke antar-etika yaitu etika kemanusiaan menggali tiga serangkai kondisi manusia yakni manusia sebagai diri individu, masyarakat dan sekaligus spesies. Bahkan juga pendidikan harus bisa menumbuhkan teo-etika yakni etika kemanusiaan yang mewujudkan pengenalan diri pada Tuhan-Nya. Potensi pendidikan yang demikian bisa dikatakan sebagai esensi keterpaduan tujuan yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

Berdasarkan uraian tentang urgensi pendidikan tersebut nyata apabila para praktisi pendidikan Islam cenderung memilih nilai-nilai pendidikan praktis untuk mengembangkan potensi kemanusiaan manusia. Pendidikan tidak sekadar upaya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga transformasi budaya, norma, dan sekaligus nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Luas cakupan pendidikan mampu mengarahkan manusia pada pola kehidupan sesuai dengan identitas teologis, filosofis, atau ideologis tertentu. Maka, wajarlah bila muncul

keyakinan bahwa hidup dan kehidupan manusia tanpa proses pendidikan akan absurd kacau atau tidak teratus.

Melihat urgensitas pendidikan tersebut, wajarlah jika pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yang secara harfiah berarti memelihara dan memberi latihan. Ditinjau dari aspeknya kebahasaan pun, pendidikan sangat erat dengan makna pemeliharaan atau pelatihan. Seperti halnya dalam bahasa Yunani "Pedagogik yang diartikan sebagai Ilmu menuntut anak. Educare (Bahasa Romawi) dimaknai mengeluarkan dan menuntun tindakan mengembangkan potensi manusia yang dibawa sejak lahir. Begitu juga dalam bahasa Jerman, Erziehung dapat diartikan sebagai usaha membangkitkan atau mengaktifkan potensi manusia. Otomatis jika dilihat dari urgensitas dan kebahasaan, pendidikan memang, sangat krusial eksistensi dan esensinya dalam tatanan kehidupan manusia.

Demikian pula dalam tradisi keilmuan keislaman ada tiga istilah yang sering digunakan untuk mewakili atau merepresentasikan upaya pendidikan tersebut yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Kata tarbiyah berasal dari kata rabba-yurabbi-tarbiyatan, yang berarti mendidik, mengasuh dan memelihara. Sedangkan kata ta'lim di ambil dari kata allama, yang berarti mengajar, menyampaikan pengetahuan, memberitahu, dan mendidik. Sementara itu, kata addaba lebih menekankan pada makna melatih, memperbaiki, menyempurnakan akhlak (sopan-santun), dan berbudi baik. Namun, kedua kata yaitu ta'lim dan ta'dib, jarang digunakan dan diterapkan sebagai wakil kata pendidikan, dengan asumsi bahwa pendidikan harus mencakup keseluruhan aspek mulai dari intelektualitas, emosionalitas, moralitas, dan spiritualitas. Oleh sebab itu, kata tarbiyah yang mengandung makna memelihara, mengasuh dan mendidik diasumsikan telah merepresentasikan maqam mengajar (allama) dan juga menanamkan budi pekerti (addaba). Terhadap konstruksi cakupan makna ini pun, ada beberapa pakar yang sepakat salah satunya adalah Jusuf Amir Feisal. Ia mengatakan "Dari sudut etimologi pengertian pendidikan Islam diwakili istilah ta'lim dan tarbiyah yang berasal dari kata dasar allama dan rabba sebagaimana digunakan dalam Al-Quran. Meskipun demikian, konotasi kata tarbiyah lebih luas karena mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik, serta sekaligus mengandung makna mengajar (allama).

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Barat

Saya percaya, pemberdayaan dalam bahaya kehilangan kekuatan teoretis dan praktisnya. Ini sebagian merupakan fungsi apa yang diidentifikasi oleh para peserta dalam dialog ini sebagai kemampuan kelas dominan untuk memulihkan kembali konsep-konsep seperti pemberdayaan menyesuaikan dengan tuntutan sosial, dan oleh karena itu mentransformasikannya menjadi terminologi kosong, normal, dan dangkal. Concha Dilgado-Gaitan menghubungkan penolakan awalnya dengan pemanfaatan pemberdayaan sebagai analisis inti dan kontruksi penjelasan dalam penelitian terhadap komunitas migran Kalifornia Selatan, tepatnya terhadap fakta bahwa terminologi tersebut telah digunakan dengan arti tindakan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja dalam suatu sistem dari perspektif orang-orang yang berkuasa.

Namun, pada saat yang sama para teoretis dan praktis pendidikan yang memiliki komitmen terhadap cita-cita pembebasan otentik telah memberikan kontribusi bagi penurunan nilai pemberdayaan saat ini. Kita telah melakukan itu

dengan dua cara.

- a. Kita sering kali secara tidak sengaja menghapus nilai asli pemberdayaan dengan menggunakannya untuk menamai ruang tempat kerja teoretis lebih dibutuhkan ketimbang mengisi ruang itu. Penggunaan yang kacau dalam istilah pemberdayaan dalam menggambaran teoretis oleh sejumlah orang-orang seperti itu berperan mengesampingkan kebutuhan akan kerja yang lebih teoretis ketika kerja semacam itu sesungguhnya banyak diperlukan.
- b. Yang membuat para pendidik pembebasan telah membantu mereduksi pemberdayaan menjadi terminologi kosong, nominal, dan dangkal adalah dengan menahan atnauscum sebagai semacam peluru magis pendidikan. Kita sering beramsumsi bahwa makna dan mandat pemberdayaan terbukti dengan sendirinya dan secara umum diterima. Kita juga meyakini bahwa begitu istilah tersebut disuntikkan wacana pendidikan akan menghasilkan strategi yang menyelesaikan masalah- masalah pendidikan baik secara kolektif maupun perorangan dalam mengatasi hambatan-hambatan emansipasi dan persamaan yang ada. Sebelum pemberdayaan menjadi kosong tanpa harapan, maka akan kita menangkap tantangan Paulo Freire dan menjadikannya sebagai subjek semacam investigasi untuk mengalami dan menghidupkan kemudian mempratikkannya.

Berbagai pernyataan mengenai pemberdayaan sama-sama eliptis, meskipun pernyataan-pernyataan itu memerlukan paling tidak empat variabel. Menjelaskan pernyataan-pernyataan itu menghendaki spesifikasi. Pertama, Subjek pemberdayaan. Kedua, struktur kekuasaan yang berhubungan atau bertentangan dengan orang atau kelompok yang diperdayakan. Ketiga, proses-proses atau kualitas yang membuat pemberdayaan itu terjadi. Keempat, tujuan atau hasil pemberdayaan.

Manfaat-manfaat yang sangat nyata mengalir dengan menanggapi tuntutan konseptual akan memperdayakan secara serius. Di sini ada jauh lebih banyak bahaya ketimbang semata-mata menonjolkan linguistik atau semantik. Semakin dekat dan jelas kita menentukan subjek-ajar tertentu, maka semakin mungkin kita mengidentifikasi bentuk-bentuk dan proses-proses kekuasaan yang membatasi pilihan-pilihan setting sehari-hari dan mempertimbangkan atau merundingkan proses dan hasil pembejarian sejalan dengan tujuan yang kita kejar. Demikian pula, semakin bagus teori kita mengenai kekuasaan dihasilkan dan didistribusikan, semakin paham kita akan keberagaman kondisi dan aspirasi peserta belajar serta semakin baik pula informasi yang akan menjadi sarana dan proses yang digunakan untuk meraih hasil belajar yang dinegosiasikan.

Mendeteksi pemberdayaan atau menemukan apa yang anda cari. Perlu diperhatikan kasus empiris sebagai kerangka akan oleh sejumlah klaim yang memusat pada pemberdayaan dan dianggap bisa terbukti dengan sendirinya secara jelas. Adapun klaim penyusun utama itu adalah: pertama, pemberantasan buta huruf bisa memberikan kontribusi bagi pemberdayaan individual dan kelompok atau sebaliknya bisa menjadikan alat dominasi dan menghancurkan kepentingan mereka.

Kedua, transformasi sosial dan pembangunan nasional yang di hadapi revolusi Nikaraguna, tidak bisa disumbangkan kepada rakyat. Ia harus perjuangkan ia harus diciptakan dengan dan melalui aktivitas kelompok yang sampai sekarang ini dipinggirkan. Ia harus bisa menjawab kebutuhan mereka dan tumbuh bersama evolusi kesadaran dan kemampuan mereka untuk melakukan tindakan sosial yang konstruktif dan tepat. Di dalam proses partisipasi ini, praktik pemberantasan buta huruf yang

benar-benar memperdayakan, sebagai sumber dan hasil perubahan sosial, memiliki peran yang sangat penting.

1. Banyak keberhasilan inisiatif emansipatoris sejati yang melibatkan upaya pemberantasan buta huruf sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar program-program khusus seperti membaca dan menulis. Oleh karena itu, harus diciptakan perubahan yang lebih luas yang benar-benar menciptakan rasa percaya diri rakyat dan menawarkan basis untuk mempraktikkan dan memperbaiki program pemberantasan buta huruf, sehingga tercipta kondisi yang membuat kemampuan membaca benar-benar bisa memberdayakan mereka dan menjadi bagian integral kehidupan yang lebih luas.
2. Setelah 1979 pemerintahan revolusioner Nikaragua (melakukan) sejumlah reformasi besar (misalnya reformasi agrarian, kampanye kesehatan, undang-undang-undang perburuhan baru) dan memelopori penciptaan struktur dan proses (misalnya, organisasi massa, saluran dialog antar rakyat dan pemimpin, dan sebagainya.) yang membantu mengilhami upaya pemberantasan buta huruf dengan efek pemberdayaan yang nyata dan memberikan landasan bagi massa untuk meyakini bahwa kehidupan mereka bisa ditingkatkan melalui keterlibatan mereka sendiri.
3. (Selama tahun-tahun revolusi Nikaragua) kasus demi kasus mengungkapkan komitmen dan kecerdikan dipihak para pemimpin revolusioner dan mereka yang memelopori organisasi massa untuk menciptakan kondisi membuat program pemberantasan buta huruf sekalipun bersifat elementer yang secara teknis tidak sempurna bisa menjadi sarana pemberdayaan yang sesungguhnya bagi individu dan kelompok di lingkup kunci kehidupan sehari-hari mereka.

Tak ada yang diluar klaim ini yang dikedepankan dengan cara menganalisis atau mendefinisikan "pemberdayaan" secara lebih eksplisit. Paling - paling, bukti-bukti empiris diberikan untuk klaim-klaim kunci yang disyaratkan oleh istilah tersebut. Masalah bagaimana tantangan pemberdayaan rakyat yang terpinggirkan menyelesaikan masalah sehari-hari mereka yang paling menekan diangkat didalam CAN dan EPB (Education Popular Basica) merupakan contoh yang khas. Hal ini diperbincangkan dengan memperhatikan upaya-upaya pedagogis untuk membeberkan ideologi- ideologi penindasan, dengan menunjukkan kaitan erat yang terbangun antara kandungan pendidikan dan pengalaman sehari-hari, dan mendokumentasikan alat-alat sederhana namun tepat untuk melibatkan para pelajar dalam bertindak berdasarkan kata-kata dan tema-tema diseperti pelajaran yang dibangun. Karena proyek-proyek (yakni pembangunan kamar kecil, penampungan air, perumahan, dan sekolah) dibuka dan disempurnakan, para partisipan benar-benar mengalami. Keagenan dalam bertindak akan datang melihat kemungkinan dan pentingnya menjadi agen-agen sejarah yang melek huruf.

1. Studi kasus terhadap program pemberantasan buta huruf dan kehidupan sehari-hari di San Jose "menggambarkan pentingnya peran program ini terhadap proses pengambilan kontrol yang lebih besar oleh rakyat terhadap jalan kehidupan sehari-hari dan peningkatan kualitas hidup sebagai konsekuensinya.
2. Studi kasus "menegaskan bahwa dukungan yang simpatik dan konstruktif bahkan terhadap kemampuan melek huruf yang paling dasar sekalipun integral dengan upaya merealisasikan potensi pemberdayaan bisa membaca dan menulis, ketika dukungan itu dipahami sesuai dengan tujuan demokrasi dan emansipasi

Sebagaimana dalam pendidikan kaum tertindas, sebagai sebuah pendidikan yang humanis dan membebaskan, memiliki dua tahapan. Tahapan pertama, kaum tertindas menyingkap dunia penindas dan melakukan perubahan melalui praktis. Tahapan kedua, setelah realitas penindasan telah berubah, pendidikan ini bukan lagi milik kaum tertindas saja, namun akan menjadi pendidikan bagi semua peran dalam proses mencapai kebebasan abadi.

Dalam kedua tahapana ini, budaya mendominasi harus dihadapi secara kultural melalui tindakan yang kuat. Pada tahapan pertama, pertentangan akan muncul melalui perubahan cara pandang penindasan oleh kaum tertindas. Tahapan kedua, melalui peniadaan mitos yang dibuat dan di kembangkan oleh tatanan masa lalu, yang seperti momok yang menghantui struktur baru yang hadir dari perubahan revolusioner.

Pendidikan ini pada tahapan pertama harus membahas masalah kesadaran kaum tertindas dan kesadaran kaum penindas yaitu masalah dari manusia yang menindas dan manusia yang merasakan penindasan. Pendidikan ini harus memperhatikan perilaku mereka, pandangan mereka akan dunia dan etika mereka. Masalah khusus yang muncul adalah adanya dualitas dari kaum yang ditindas, terbagi menjadi dua yang saling bertentangan, terbentuk dan muncul dalam keadaan penindasan dan kekerasan.

KESIMPULAN

Relevansi pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Timur dan Barat melalui dengan pendekatan filsafat pendidikan. Berdasarkan paparan dari bab dan sub bab, dalam pemberdayaan masyarakat peneliti memilih filsafat pendidikan sebagai metodologi. Dengan adanya filsafat pendidikan dalam perspektif Timur dan Barat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, peneliti berani mengambil kesimpulan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat filsafat pendidikan sebagai salah satu tawaran untuk masyarakat awam dan masyarakat elit atau akademisi.

Tentunya dari kedua perspektif yakni perspektif Timur dan perspektif Barat sama-sama memiliki metodologi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Timur dan Barat memiliki perbedaan dan persamaan. Misalnya, pemberdayaan dalam perspektif Timur ia sangat akurat, sistematis, kritis dan paradigmatis serta progresif. Adapun dalam pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Barat ia hanya kritis. Walaupun dari segi persamaan atau relevansi dari kedua pemberdayaan tersebut melalui epistemologi.

Dalam artian, epistemologi sebagai relevansi dari kedua perspektif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Sederhananya, epistemologi sebagai landasan atau acuan agar masyarakat bisa berdaya, kritis, sistematis hingga sampai pada kesejahteraan pemikiran dan kehidupan sehari-hari yakni kesejahteraan sosial.

AFTAR PUSTAKA

Agus Ahmad Safei, Aya Ono & Ela Nur Hayati, Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam Dan Barat (Simbiosa Rekatama Media, 2020)

Al-Qura`n ul Karim

Endah, Kiki, 'Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa', Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020, ISSN: 2442-3777 (Cetak) Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (Online), 2020.

- Helminah, N. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Topejawa Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Berita Sosial*, 8(1), 26-33.
- Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel) Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222 Telp. 0811 4124 721 Email : gunmonoharto@yahoo.com, 2018)
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011) Mestika Zed, 'Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor'.
- Muslimin, S. R., Said, N. M., & Syakhrudin, D. N. (2024). Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Memajukan Perekonomian Desa Leubatang Di Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Berita Sosial*, 9(1), 83-94.
- Mustafa, M., & Mandjarreki, S. (2024). Peran Dakwah Terhadap Kepercayaan Kembar Gaib Di Kampung Baru Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. *Jurnal Berita Sosial*, 9(1), 1-11.
- Nahar Effendi, 'Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan', *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis Available Online at: [Http://Ejournal.Stia-Lk-Dumai.Ac.Id/Index.Php/Japabis31PRINSIP-PRINSIP](http://Ejournal.Stia-Lk-Dumai.Ac.Id/Index.Php/Japabis31PRINSIP-PRINSIP) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN*, 2019, h. 33.
- Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial
- Paulo Freire, on Higher Education; A Dialogue at at the National University of Mexico, penerjemah, Mundi Rahayu, Sekolah Kapitalisme Yang Licik, (Yogyakarta, Ircisod, 2016).
- Rahmat Hidayat, Pedagogi kritis: Sejarah, perkembangan dan pemikiran, (Jakarta, Rajawali, 2023)
- Soehartono, I. (2008). Metode Penelitian Sosial (Cet. VII). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2013) Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta, Bandung, 2012)
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Rineka Cipta, Jakarta, 1993)
- Sukmadinata, N. S. (2005). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumaryadi, Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat, 2004. 'Tahapan-Tahapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat', Lampung, Blog UI An Nur Tahapan, 2023
- Walter Rinaldy, 'Analisis Isi (Content Analysis)', 2015, <<http://rinaldytuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis>>
- Widjajanti, Kesi, 'Model Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, Hlm.15-27.